

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
MELALUI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKUEDES)**

**(Studi Pada Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan**

**Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S-1)**

Oleh:

**ALFA MAFAZA ALMA**

**NPM: 218.010.910.75**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**2023**

## ABSTRAK

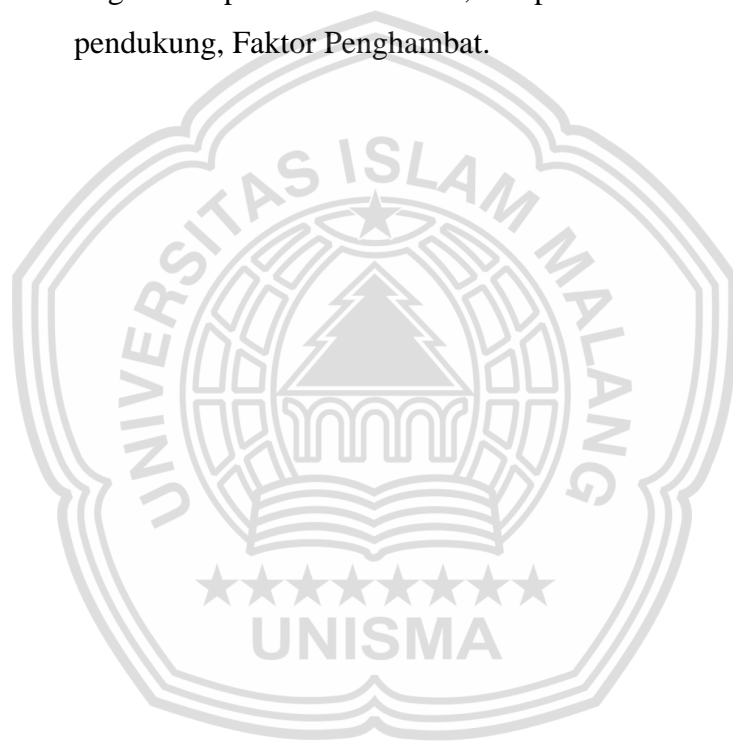
Alfa Mafaza Alma, 2023, NPM 21801091075, Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Implementasi Program Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Pada Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Dosen Pembimbing I: Prof. Dr. Yaqub Cikusin. M.Si, Dosen Pembimbing II: Dr. Hayat, S.AP., M.Si

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya program pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam mengatasi adanya otonomi desa menimbulkan bertambahnya kewenangan pemerintah desa dalam mengelola pemerintahannya secara mandiri. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa tidak terlepas dari faktor keuangan, sehingga dalam pengelolaan keuangan desa harus bersifat transparan dan akuntabel. Dengan tersebut pemerintah mengembangkan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes), aplikasi ini bertujuan untuk pengelolaan keuangan desa agar lebih tertib, bersih, efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyimpulkan pokok permasalahannya yaitu bagaimana implementasi program pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dan apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam implementasi program pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi program pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi sistem keuang desa (siskeudes) sudah memenuhi beberapa konsep menurut David C. Korten dalam Akib & Tarugan (2010) terdapat tiga pilar elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu: kesesuaian program dengan pemanfaat. kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Faktor pendukung dalam

implementasi program pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) berdasarkan George C. Edward III dalam Hayat (2018) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk faktor penghambat dalam implementasi program pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) berdasarkan Bambang Sunggono (1994) yaitu informasi dan dukungan.

**Kata Kunci:** Program Aplikasi Siskeudes, Implementasi Kebijakan, Faktor pendukung, Faktor Penghambat.



## ABSTRACT

Alfa Mafaza Alma, 2022, NPM 21801091075, State Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Implementation of the Village Financial Management Program Through the Application of the Village Financial System (SISKEUDES) (Study in Mulyoagung Village, Dau District, Malang Regency) Advisory Lecturer I: Prof. . Dr. Yaqub Cikusin. M.Si, Advisor II: Dr. Hayat, S.AP., M.Si

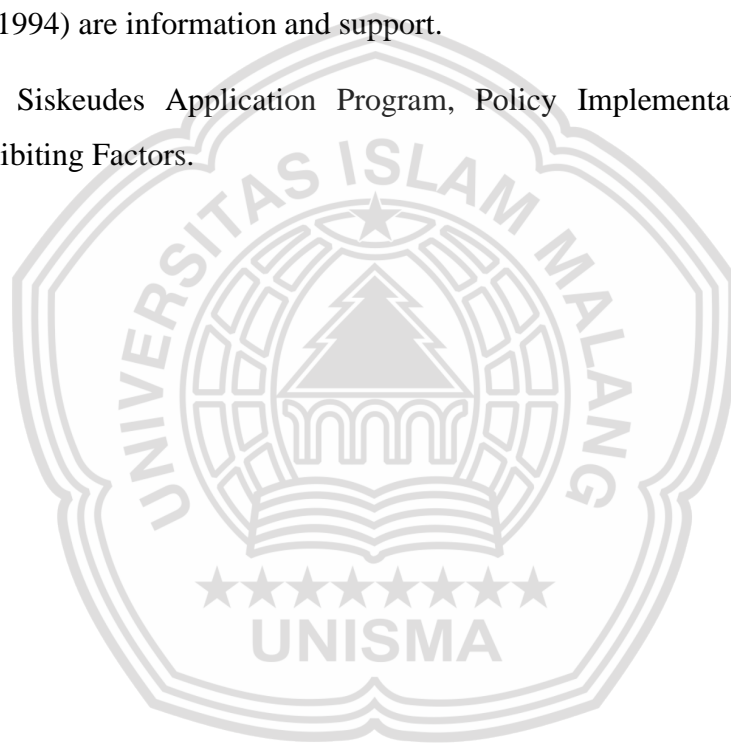
---

This research was conducted on the basis of the existence of the Village Financial Management Program through the Application of the Village Financial System (Siskeudes) in overcoming the existence of village autonomy resulting in increased village government authority in managing its administration independently. The implementation of village government is inseparable from financial factors, so that village financial management must be transparent and accountable. With this, the government developed the Village Financial System (Siskeudes) application, this application aims to manage village finances so that they are more orderly, clean, effective and efficient. Based on this, the authors conclude that the main problem is how to implement the Village Financial Management Program through the Village Financial System Application (Siskeudes) and what are the supporting and inhibiting factors encountered in implementing the Village Financial Management Program through the Village Financial System Application (Siskeudes). The purpose of this study was to describe the implementation of the Village Financial Management Program through the Village Financial System Application (Siskeudes) along with its supporting and inhibiting factors. The research method used is interview and observation.

The results of the study show that the implementation of the Village Financial Management Program Through the Application of the Village Financial System (Siskeudes) has fulfilled several concepts according to David C. Korten in Akib & Tarugan (2010) there are three pillar elements in program implementation, namely: Compatibility of the program with the beneficiaries. Conformity of the program with

implementing organizations, compatibility between beneficiary groups and implementing organizations. Supporting factors in implementing the Village Financial Management Program Through the Village Financial System Application (SISKEUDES) based on George C. Edward III in Hayat (2018), namely communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure. The inhibiting factors in the implementation of the Village Financial Management Program through the Application of the Village Financial System (Siskeudes) based on Bambang Sunggono (1994) are information and support.

**Keywords:** Siskeudes Application Program, Policy Implementation, Supporting Factors, Inhibiting Factors.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Teknologi yang paling berkembang adalah teknologi yang berbasis website atau yang akrab disebut dengan internet. Kehadiran teknologi internet di tengah masyarakat mampu memenuhi kebutuhan akan informasi dengan sangat cepat, tepat, dan akurat. Pergeseran Teknologi Informasi sekarang sudah menjangkau ke semua bidang, kebutuhan informasi yang akurat, tepat dan cepat dalam menyajikan data yang sangat lengkap merupakan salah satu tujuan penting.

Teknologi berperan aktif dalam segala bidang dan akan mempermudah pekerjaan manusia. Pemanfaatan teknologi yang kemudian sangat pesat perkembangannya. Keunggulan dari teknologi dengan sistem operasi memungkinkan pengguna memasang banyak aplikasi yang menunjang pekerjaan keseharian mereka. (Abdul Haris Nur Sugeng, dkk 2021).

Pemerintah merupakan unsur negara yang berperan penting dan bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan suatu negara. Pemerintah sebagai regulator memiliki peran untuk memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Maka dari itu diperlukannya pemberdayaan masyarakat guna



menciptakan kesejahteraan masyarakat yang optimal dan merata. (Muhammad Ama Ridlwan, dkk 2017)

Kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk mencapai tujuan nasional yang relevan (Riant Nugroho, 2012). Negara berperan penting dalam membuat suatu kebijakan publik untuk mengatasi masalah yang terjadi di negaranya. Salah satu kebijakan publik yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu kebijakan publik dalam mengatasi pengelolaan keuangan desa. Kebijakan publik di Indonesia yang mengatur Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 6 mendefinisikan bahwa wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintah secara mandiri serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Menurut Hayat (2018) desa dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam didalamnya dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, dengan menciptakan keteraturan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan tanggung jawab bersama kelompok masyarakat tersebut.

Dalam hal tersebut pemerintah daerah diberi keluasaan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peningkatan daya saing daerah dengan mempertahankan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kehususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Windasai dkk, 2021).

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa tidak lepas dari peraturan untuk keberhasilan dan keberlangsungan pemerintahan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa dan dana desa harus bersifat transparan dan akuntabel yang merupakan salah satu bentuk keterbukaan pemerintah desa. Jika laporan keuangan desa dan dana desa dapat diakses berbagi pihak dilaksanakan dengan baik maka kinerja pemerintah desa akan meningkat. Desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan (Suyono & Prakoso, 2018).

Pemerintah desa diharapkan lebih fokus dalam mengelola pemerintahan desa. Berbagai sumberdaya alam yang dimiliki, pengelolaan keuangan desa dan dana desa serta kekayaan milik desa. Peran pemerintah desa memiliki wewenang yang besar dan memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu pemerintah desa diuntut untuk menerapkan pemerintahan yang akuntabel dan transparansi dalam menjalankan pemerintahannya. Karena semestinya desa dalam mengelola keuangan desa harus



memperhatikan azas transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran (Rivan & Maksum, 2019).

UU No.6/2014 tentang desa telah membuka peluang bagi desa menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud ialah otonomi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Program yang diberikan pemerintah saat ini ialah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan pemberian dana desa ialah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Lajaba, Halim & Aspirandi, 2022).

Secara umum pengelolaan desa dan dana desa ada beberapa permasalahan dalam laporan keuangan desa yaitu masih sering terjadinya keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke kecamatan, masih lemahnya ketrampilan sumberdaya manusia yang ada, masih kurangnya alat pendukung, dan infastruktur yang memadai, dalam pembuatan laporan masih menggunakan cara tradisional. Dana Desa merupakan kebijakan yang baru bagi Desa itu sendiri, banyak kalangan yang meragukan keberhasilan dari kebijakan ini karena ketidaksiapan dari Aparatur Pemerintah Desa itu sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan yang bussiness process-nya hampir sama dengan tingkat Pemerintah Daerah (Fahri, 2017).

Melihat beberapa permasalahan yang ada pemerintah pusat mengembangkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes), aplikasi ini dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP adalah Lembaga pemerintah kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan

negara/ daerah dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Suatu organisasi atau kegiatan tentunya dibuat dengan suatu tujuan. Tujuan adalah hal yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh sesuatu organisasi atau kegiatan tersebut. Tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai dengan maksimal dengan adanya dukungan dari segala pihak. (Siti Nur Ainiah, dkk 2021)

BPKP membuat Aplikasi Siskeudes dengan bertujuan untuk pengelolaan keuangan desa dan dana desa agar laporan keuangan desa dan dana desa menjadi lebih akuntabel dan transparan, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemandagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 72 dimana laporan pertanggung jawaban keuangan desa dapat diinformasikan kepada masyarakat. Program aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang digunakan oleh pemerintah desa, aplikasi ini juga sangat berguna untuk masyarakat desa, agar masyarakat dapat melihat hasil pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Siskeudes saat ini telah menemukan bentuknya yang pasti dan secara bertahap dan diterapkan diseluruh Indonesia untuk membantu desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara efektif dan efisien.

SISKEUDES terus dikembangkan oleh pemerintah pusat sehingga muncul beberapa versi dalam aplikasi ini. Adapun versi dalam aplikasi SISKEUDES yaitu versi 2.0.0, 2.0.1, 2.0.2, dan yang terbaru yaitu versi 2.0.3. SISKEUDES versi 2.0.3

yang baru rilis pada tanggal 30 Juni 2020 ini melengkapi versi sebelumnya yang 2.0.2 (Asih & Adiputra, 2022).

Aplikasi siskeudes ini juga mempunyai tujuan agar pengelolaan keuangan dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini adalah memudahkan para desa dalam pelaroran RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan), Dokumentasi Penatausahaan, Laporan Realisasi APB Desa, Laporan Kekayaan milik Desa, Laporan realisasi Sumber dana, Laporan Realisasi tingkat Pemda. Pada tanggal 27 November 2015 kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran Nomor: 143/8350/BPD kepada Gubernur dan bupati/ Walikota untuk menegaskan agar desa-desa diseluruh Indonesia menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa sebagai aplikasi resmi dari pemerintah dan menghindari aplikasi lain dari pihak ke tiga. Selain surat dari Kemetrian Dalam Negeri, pada tanggal 31 Agustus 2016 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat edaran Nomor: B.7508/01/16/16/08/2016 pada para Kepala Desa seluruh di Indonesia Terkait pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa untuk menggunakan aplikasi siskeudes dalam hal ini aplikasi siskeudes menjadi aplikasi wajib yang harus digunakan dalam pengelolaan keuangan desa dan dana desa.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 memiliki tujuan untuk membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik lagi.

Prinsip proses pelaksanaan program ini adalah bagaimana pelaksanaan pembangunan desa dapat dikawal dengan adanya aturan dari pemerintah sampai laporan pertanggungjawaban, sehingga dimasyarakat timbul sikap saling percaya, karena itu kita juga melibatkan masyarakat. (wawancara 28 Oktober 2022)

Pemerintah desa juga memiliki peranan penting dalam menentukan kemajuan suatu desa karena bertugas memberikan pembinaan dan pengawasan, pemerintah desa juga dituntut untuk menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan desa agar desa berkembang dengan baik (Maulana dkk, 2021).

Implementasi kebijakan, secara luas, adalah instrumen peraturan di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002). Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut adalah kegiatan sosialisasi dan Bimtek (Bimbingan Teknis) oleh masing-masing perwakilan BPKP serta dilakukan oleh Satgas Pusat bersama Ditjen Bina Pembangunan Desa Kementrian Dalam Negeri juga bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/kota. (Wawancara 31 Oktober 2022)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan Program Aplikasi Siskeudes termasuk Pemerintah Kabupaten Malang. Fokus dalam penelitian ini berada di Kantor Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Karena salah satu Desa yang menerapkan aplikasi Siskeudes. Semua pengelolaan keuangan desa telah menggunakan aplikasi Siskeudes, dengan adanya aplikasi Siskeudes ini aparatur desa dalam

melakukan pekerjaan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih cepat, singkat dan tidak bekerja dua kali.

Agar sebuah kebijakan dapat tercapai, maka implementasi kebijakan perlu memiliki beberapa unsur. Menurut David C. Korten dalam Akib & Tarugan (2010) terdapat tiga konsep yang ada dalam pelaksanaan program yaitu kesesuaian program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Selain itu, dalam proses implementasi kebijakan, terdapat beberapa faktor yang selalu ada menyertai yaitu faktor pendukung dan penghambat. Menurut Bambang Sunggono (1994), ada beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan, informasi, dukungan dan pembagian potensi. Sedangkan faktor pendukung pengimplementasian kebijakan dijelaskan oleh George C. Edward III dalam Hayat (2018) yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Adanya faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan akan mempengaruhi berhasil tidaknya sebuah kebijakan dalam mencapai tujuannya, hal ini juga berlaku pada implementasi program pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes).

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan faktor-faktor pendukung dalam menjalankan program Siskeudes. Salah satu faktor pendukung tersebut adalah lebih jelas dan terperinci, laporan keuangan lebih mudah dipahami, aplikasi yang mudah. (wawancara 28 oktober 2022).

Sedangkan faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini adalah salah satunya kurang cepatnya info yang datang ke kita (perangkat desa), info itu maksudnya tentang sistem baru misalnya lambatnya informasi dari pemerintah pusat tentang pelatihan operator siskeudes yang saat terjadi permasalahan sistem pada aplikasi Siskeudes, yang metodenya secara online dan memiliki permasalahan pada jaringan dan pembaharuan sistem yang terbaru (wawancara 31 oktober 2022)

Urgensi dalam penelitian ini adalah dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) lebih transparan dan akuntabel, jika dalam pengelolaan sudah transparan dan akuntabel maka dapat dipastikan pemerataan pembangunan desa akan sesuai dengan sasaran. Salah satu syarat dalam pembangunan desa, maka dalam pengelolaan harus lebih transparan dan akuntabel.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka penulis akan melakukan sebuah penelitian di Kantor Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebagai tugas akhir dengan judul “*Implementasi Program Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) Studi Pada Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang*”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Aplikasi Siskeudes di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang?



2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Aplikasi Siskeudes di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Aplikasi Siskeudes Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Aplikasi Siskeudes di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### 1.4.1 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan referensi dan tukar pikiran oleh kantor desa mulyoagung terkait implementasi program sistem keuangan desa (siskeudes) tentang pengelolaan pemerintah.
2. Dapat membantu memberikan wawasan tambahan bagi seluruh pegawai pemerintah desa yang terlibat agar mampu melayani dengan lebih baik dan profesional dalam penggunaan aplikasi Siskeudes.

#### 1.4.2 Manfaat Akademik

1. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi referensi mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, terutama berkaitan dengan Implementasi Aplikasi Siskeudes.
2. Diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan dan kajian baru khususnya dibidang pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa dan dana desa melalui aplikasi.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Pada Bab I Pendahuluan Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah mengenai implementasi program pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) desa mulyoagung kecamatan dau kabupaten malang dan apakah dengan adanya aplikasi tersebut pengelolaan lebih transparan dan akuntabel? beserta terdapat beberapa rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan yang berisi tentang uraian-uraian singkat dari bab penelitian yang akan ditulis pada penelitian ini.

Pada Bab II sendiri Tinjauan Pustaka sebanyak 5 penelitian yang dijadikan acuan dan bahan pada penelitian dan kajian teori yang berkesinambungan dengan judul pada penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian memuat tentang jenis, fokus, pemilihan lokasi, dan situs, sumber data, pengumpulan data, instrument yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Pada bab ini menjelaskan mengenai dari hasil penelitian dan penyajian data yang diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan fokus penelitian dimana menganalisis Implementasi Program Aplikasi Siskeudes, hambatan program aplikasi siskeudes dan upaya dalam mengatasi hambatan siskeudes, kemudian terdapat pembahasan penelitian bersumber dari teori-teori yang berhubungan dan sesuai dengan apa yang telah diteliti di lapangan.

Bab V Kesimpulan Pada bab ini berisi mengenai ringkasa dari hasil penelitian dan pembahasan dari Implementasi Program Aplikasi Siskeudes disertai dengan saran penting yang diperlukan serta berkaitan dengan hasil penelitian



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Siskeudes sudah memenuhi tiga konsep yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan program menurut David C. Korten dalam Akib & Tarugan (2010) yaitu kesesuaian antara program dengan manfaat, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Kesesuaian antara program dengan manfaat dari konsep tersebut program yang di tawarkan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah desa khususnya desa mulyoagung telah berjalan sesuai dengan manfaatnya, karena telah berjalan sesuai aturan yang berlaku dan melibatkan masyarakat demi berjalannya tujuan aplikasi siskeudes. Untuk program yang dilaksanakan dalam kebijakan tersebut adalah Program Aplikasi Siskeudes. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana dari konsep tersebut dari kesiapan organisasi dalam pelaksanaan Program Aplikasi Siskeudes telah mempersiapkan sarana dan prasara serta kesiapan sumber daya yang mendukung, dengan dilakukannya Bimtek (Bimbingan Teknis), juga telah sesuai dengan aturan yang terkait dengan mempertimbangkan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang berlaku. Kemudian terakhir kesesuaian antara

kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana dari konsep kebijakan tersebut adalah dalam pelaksanaan program aplikasi siskeudes telah memberikan informasi kepada masyarakat terkait pembangunan desa serta pengelolaan keuangan desa, penyusun anggaran, musrenbang desa. Sehingga menimbulkan interaksi sosial dari itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

2. Faktor pendukung dalam implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Siskeudes berdasarkan George C. Edward III dalam Hayat (2018) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk masing-masing faktor pendukung tersebut memiliki beberapa indikator. Untuk indikator komunikasi dalam implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Siskeudes. Lalu indikator sumber daya implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Siskeudes.. Kemudian indikator disposisi implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Siskeudes.. Yang terakhir indikator struktur birokrasi terdiri dari SOP dan fragmentasi.
3. Faktor penghambat implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Siskeudes berdasarkan Bambang Sunggono (1994) yaitu informasi, dukungan, dan tidak adanya struktur organisasi yang jelas.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat diberikan yaitu :

## 1. Saran Akademis

- a. Mempelajari lebih luas mengenai materi implementasi kebijakan, karena implementasi kebijakan tidak hanya membahas unsur-unsur dalam implementasi kebijakan saja. Tujuannya agar mempermudah peneliti selanjutnya dalam menentukan materi implementasi kebijakan yang mana perlu dibahas atau disajikan dalam penelitian atau skripsinya.
- b. Banyak mempelajari tentang faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan. Karena terdapat beberapa teori atau pendapat menurut ahli mengenai faktor pendukung dan penghambat. Tujuannya agar mempermudah peneliti selanjutnya dalam menentukan teori faktor pendukung dan penghambat yang akan dibahas atau disajikan dalam penelitian atau skripsinya.

## 2. Saran Praktis

Dalam pelaksanaan aplikasi Siskeudes mendapati beberapa hambatan yaitu kurangnya pemerintah desa dalam mendapatkan informasi dan memberikan informasi kepada masyarakat, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah terkait peraturan serta sarana dan prasarana, dan tidak adanya struktur yang jelas dalam pelaksanaan program aplikasi Siskeudes. Dengan adanya hambatan ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Dari segi kurangnya informasi pengelolaan keuangan berbasis aplikasi Siskeudes yang memanfaatkan media sosial perlu dilaksanakan secara



bertahap, dari proses pembuatan perencanaan sampai pelaksanaan dilapangan, serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat luas dapat lebih memahami apa kegunaan serta manfaat aplikasi Siskeudes.

- b. Faktor penghambat dari kurangnya dukungan dari pemerintah daerah diharapkan pemerintah Desa Mulyoagung berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk pembuatan peraturan terkait pengelolaan keuangan desa Mulyoagung berbasis aplikasi Siskeudes serta penambahan sarana dan prasarana khususnya perangkat keras seperti komputer, dan lain-lain agar lebih menunjang kerja perangkat Desa Mulyoagung dalam pengelolaan keuangan berbasis aplikasi Siskeudes.
- c. Pembagian struktur dalam pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes diharapkan dibentuknya peraturan serta kebijakan untuk pembuatan struktur baru, sehingga perangkat desa yang lain paham dengan aplikasi siskeudes dan tidak bergantung pada operator sistem. Agar lebih menunjang kerja perangkat Desa Mulyoagung dalam pengelolaan keuangan berbasis aplikasi Siskeudes.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat,
- Basori, Akhmad., Megantoro, Robertus G., Lasantu, Arief Irwanto. 2016. *Buku Kerja Aplikasi Sistem Keuangan Desa*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga
- Hayat, H., 2018. *Kebijakan Publik Evaluasi Reformasi Formulasi*. Malang :Intrans Publishing
- Hayat, H., 2018. *Reformasi Kebijakan Publik*, Jakarta : Kencana
- Hayat, H., 2019 *Hukum dan Kebijakan Publik*,: Refika Aditama
- Kamayanti, Ari. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh
- Mils, Huberman and Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook (3th edition)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nugroho, R., & Suprpto, F. A. (2021). *Manajemen Keuangan Desa Bagian 3: Pelaksanaan Keuangan Desa*. Elex Media Komputindo.
- Penny Kusumastuti. 2014. *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Raharjo, M. M. I. (2021). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Bumi Aksara.
- Sueca, I. Nyoman. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan*. Medam : Sefa Bumi Persada
- Sulistyowati Efi. (2020). *Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa*.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. (1994). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika

Tachjan, H., Mariana, D., & Paskarina, C. (2006). Implementasi kebijakan publik. AIPI.

Tim Visi Yustisia. 2016. Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa. Jakarta: Visimedia

Wahab 2016. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik* . Bumi Askara : Bandung

Yin, Robert K. 2014. *Studi Kasus: Desain dan Metode cet-13*. Depok: RajaGrafindo Persada

#### JURNAL:

Adisasmita, Raharjo. 2011. Manajemen pemerinrah Daerah. Yogyakarta. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/files/Materi/Paparan%2520BALI-BPKP.pdf>

Ainiah Siti Nur, Afifuddin, Hayat. 2021. *Implementasi Program Posyandu Lanjut Usia (Lansia) Di Rw I Kelurahan Polowijen (Studi Kasus Pada Pos Pelayanan Terpadu Lansia Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang)*. Jurnal Inovasi Penelitian

Akib, Header., & Tarigan, Antonius (2008). Arkulturasi Konsep Implementasi Kebijakan: Prespektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. Jurnal Baca Agustus, Vol, pp.1-19

Asih, G., & Adiputra, I. M. P. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0. 3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Kalibukbuk, Kec. Buleleng, Bali). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(01), 12-23.

Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Akurasi: *Journal of Accounting and Finance Studies*, 2(1), 63-76.

Asriadi. (2021). *Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Di Desa Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo)*

Fahri, L. N. (2017). Pengaruh pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 75-88.

Lajaba, P. D. Y., Halim, M., & Aspirandi, R. M. (2022). Systematic Literature Review: Aplikasi Siskeudes Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Dan Kinerja Perangkat Desa. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis)*, 8(2), 66-76.

- Lukito, C. (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro. *JIAN-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 2(1), 36-42.
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada organisasi pemerintahan desa (Studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Malumperas, M. H., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
- Maulana Firman, Mohammad Mas'ud Said dan Hayat. 2021. *Pengaruh Kinerja Organisasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
- Hajar El Qorina. 2019. *Implementasi Siskeudes dalam Pembangunan Desa Perspektif Teori Tafwidhi dan Tanfidzi Imam Al-Mawardi*
- Martini Rita, Resy Agustin, Amira Fairuzdita, Anggun Noval Murinda. (2019). *Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa*.
- Ridwan Muhammad Anur. (2019). *Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran*.
- Ridwan Muhammad Ama, Slamet Muchsin, Hayat. 2017. *Model Pengembangan Ekowisata dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lokal*. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review
- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 92-100.
- Sugeng Abdul Haris Nur, Slamet Muchsin, Hayat. 2021. *Implementasi Program Si Perlu (Sistem Informasi Presensi Pemerintah Kabupaten Lumajang) Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai (Studi Kebijakan Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang*. Jurnal Respon Publik: Malang.
- Suyono, D., & Prakoso, F. E. A. (2018). Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 1(1).

Taufik, T. (2018). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus, 1–61*.

Windasai, Mohammad Mas'ud Said, Hayat. 2021. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep)*. Jurnal Inovasi Penelitian

#### **SUMBER INTERNET:**

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2017) Aplikasi Siskeudes.

<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>.

Pelaksanaan Siskeudes kabupaten Ponorogo.

<https://regional.kompas.com/read/2017/01/03/11440601/dinilai.sukses.kelola.keuangan.desa.bupati.ponorogo.berbagi.pengalaman.di.india>

#### **SKRIPSI:**

Winarno Tedy. (2021). Pengembangan Desa Wisata Adat Melalui Konsep Penta Helix (Studi Kasus Desa Wisata Adat Using Kemiren Banyuwangi). FIA Publik UNISMA

#### **PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa